

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa politik yang ada di Indonesia selalu menarik perhatian untuk diikuti perkembangannya. Hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekali pun peristiwa politik itu bersifat rutin belakang, seumpamanya rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan pendukungnya (Suwardi, 2004:1).

Dalam peristiwa politik tentunya akan terjadi sebuah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya berupa sistem sosial dan sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

Komunikasi politik hanya bagian dari iklan politik yang bertujuan untuk menyampaikan dan mempromosikan pesan-pesan politik. Iklan politik bersifat komunikasi satu arah yang berarti memiliki peran untuk menyampaikan pesan dan informasi politik tanpa melibatkan interaksi dengan masyarakat secara aktif untuk mendengarkan, menerima, dan melaksanakan pesan-pesan politik tersebut. Komunikasi politik begitu penting sehingga sebelum melakukan pemilihan umum masyarakat akan disuguhkan acara

debat publik. Debat publik merupakan sarana bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja.

Pada tahun 2018 Negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang merupakan agenda politik nasional. Pilkada serentak digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Salah satu agenda pemilihan umum tingkat provinsi yaitu pemilihan umum gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik yang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali.

Debat publik memberi fungsi positif bagi naiknya spirit publik. Pro dan kontra mewarnai jalannya debat tersebut, dikarenakan ada ujaran yang bersifat santun dan tidak santun. Ujaran yang bersifat santun berupa pujian, ucapan terima kasih, dan penghormatan sedangkan ujaran yang bersifat tidak santun berupa ejekan, cacian, sindiran, dan menghina. Kata santun mempunyai makna memperhalus ujaran atau tuturan dan kata tidak santun mempunyai makna ujaran atau tuturan yang tidak sepatasnya diucapkan. Oleh sebab itu, peneliti akan mengkaji permasalahan kesantunan dan ketidaksantunan dalam debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur.

## **B. Batasan Masalah**

### **1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengkaji kesantunan dan ketidaksantunan linguistik. Dalam kesantunan linguistik terdapat berbagai macam teori kesantunan seperti teori kesantunan muka Brown dan Levinson, teori prinsip kerja sama Grice, teori prinsip kesantunan Leech, dan prinsip saling tenggang rasa Aziz sedangkan ketidaksantunan linguistik terdapat berbagai macam teori ketidaksantunan seperti teori ketidaksantunan Sara Mills faktor gender, kelas sosial, dan ras,

teori Keinpointner ketidaksantunan termotivasi dan tidak termotivasi, dan teori Jonathan Culpeper strategi ketidaksantunan.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti membatasi masalah mengenai kesantunan linguistik milik Brown dan Levinson, meliputi: kesantunan secara langsung, kesantunan positif, kesantunan negatif, dan kesantunan tersamar (semu). Teori ketidaksantunan milik Jonathan Culpeper, meliputi: ketidaksantunan secara langsung, ketidaksantunan positif, ketidaksantunan negatif, sarkasme, dan menahan kesantunan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesantunan linguistik dalam wacana debat pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana ketidaksantunan linguistik dalam wacana debat pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesantunan linguistik dalam wacana debat pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui ketidaksantunan linguistik dalam wacana debat pemilihan gubernur Provinsi Jawa Timur

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pada bidang linguistik khususnya pragmatik. Berkaitan dengan bidang pragmatik dapat memperkaya khasanah teori kesantunan dan ketidaksantunan.

### **2. Secara Praktis**

Bagi pembaca dapat menambah wawasan pengetahuan kebahasaan tentang kesantunan dan ketidaksantunan linguistik dalam debat publik.

Bagi mahasiswa PBSI unipa Surabaya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian linguistik, kesantunan, ketidaksantunan, dan sarkasme.

Bagi peneliti dapat menambah ilmu dan teori praktik sekaligus memantapkan teori kesantunan dan ketidaksantunan yang telah dikuasai dengan menyalurkan melalui penelitiannya.

## **F. Definsi Istilah**

Kesantunan linguistik adalah cara bahasa digunakan dalam percakapan untuk menunjukkan pertimbangan untuk perasaan dan keinginan lawan bicara seseorang, untuk menciptakan hubungan interpersonal yang disebut perilaku politik, serta untuk mematuhi aturan masyarakat atau budaya seseorang menganggap perilaku yang tepat.

Ketidaksantunan linguistik adalah sikap negatif terhadap perilaku khusus yang terjadi dalam konteks tertentu yang ditopang oleh harapan, keinginan, dan keyakinan tentang bagaimana identitas seseorang atau kelompok dimediasi oleh orang lain dalam interaksi.

Muka positif merupakan keinginan individu seseorang bahwa kepribadiannya dihargai oleh orang lain. Lebih jauh, ini termasuk cara seseorang ingin dipersepsikan oleh kelompok sosialnya.

Muka negatif merupakan hal yang menggambarkan hak-hak dasar pribadi seseorang, termasuk kebebasan pribadinya dan juga kebebasan bertindak. Muka negatif seseorang adalah pengabaian terhadap semua faktor yang mewakili ancaman terhadap hak-hak individu.